

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menerangkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perkembangan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah tidak terlepas dari adanya legalitas hukum dalam bentuk Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Undang-Undang ini mengizinkan lembaga perbankan menggunakan prinsip bagi hasil, bahkan memungkinkan bank untuk beroperasi dengan *dual system*, yaitu beroperasi dengan sistem bunga dan bagi hasil, sebagaimana dipraktekan oleh beberapa bank di Indonesia.

Di Indonesia sendiri sudah muncul gagasan mengenai bank syariah pada pertengahan tahun 1970 yang dibicarakan pada seminar Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan Seminar Internasional pada tahun 1976 (Salman, 2012:2). Di dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tercantum bahwa fungsi perbankan syariah melakukan fungsi perhimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Permasalahannya adalah bagaimana implementasi pelaksanaan prinsip bagi hasil

dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana di perbankan syariah. Untuk keperluan pengawasan tentang hal tersebut Dewan Syariah Nasional membentuk garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam (Antonio, 2001:32).

Menurut Muhammad (2005:179) Pada umumnya produk yang ditawarkan dalam perbankan syariah kepada nasabah diantaranya adalah a) produk *funding* berupa tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah, b) produk *financing* berupa pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Pembiayaan murabahah merupakan produk berakad jual-beli dengan berorientasi bisnis. Sedangkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan produk yang berakad kerjasama dan berorientasi bisnis yang berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat berupa giro, tabungan atau deposito.

Dalam mengelola asset lembaga keuangan syariah maka diperlukan sistem akuntansi yang baik oleh karena itu IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur tentang akuntansi perbankan syariah yakni PSAK No. 59 yang berisi tentang: mengatur pengakuan dan pengukuran masing-masing produk yakni: murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, istishna ijarah, dan transaksi-transaksi berbasis imbalan. Namun saat ini sesuai dengan perkembangan yang ada IAI telah mengeluarkan PSAK No. 105 yang lebih spesifik mengatur mengenai mudharabah. PSAK No. 105 mulai berlaku efektif 1 Januari 2008. PSAK No. 105 ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007. Dengan dikeluarkannya PSAK No.105 yang mengatur mengenai mudharabah

merupakan salah satu proses evaluasi apakah sistem perbankan yang ada telah dijalankan sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah.

Dasar pemikiran pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Pembiayaan mudharabah itu sendiri adalah salah satu produk dari bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil. Secara teknis al-mudharabah dapat diartikan sebagai suatu bentuk akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan apabila rugi maka kerugian akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, sebaliknya jika kerugian diakibatkan karena kekurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Yulistiyanti, 2013).

Didalam pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam hal kegiatan penghimpunan dana dalam bank syariah cukup mendapat kepercayaan dari masyarakat, akan tetapi dalam hal penyaluran dana yang dilakukan bank syariah dalam bentuk pembiayaan masih cukup banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pembiayaan di bank syariah tidak berbeda dengan kredit di bank konvensional atau belum benar-benar diterapkan sesuai hukum Islam.

Mengingat kepercayaan dari masyarakat merupakan salah satu kunci sukses yang mendorong kemajuan perusahaan, PT Bank Syariah Bukopin Surabaya berupaya melaksanakan kegiatannya dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip tata kelola yang baik. Adapun visi dari Bank Syariah Bukopin adalah menjadi bank syariah pilihan dengan pelayanan terbaik. Dengan adanya visi tersebut maka Bank Syariah Bukopin terus berupaya menjaga sumber daya insani yang profesional dan amanah serta standar akuntansi yang digunakan sebagai prinsip syariah dalam mencapai visi Bank Syariah Bukopin tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Akuntansi Bagi Hasil Pada Pembiayaan Produk Bank Syariah”**.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akuntansi bagi hasil yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Bukopin Surabaya, khususnya pada transaksi pembiayaan mudharabah.
2. Untuk mengetahui apakah perlakuan dalam penerapan akuntansi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan PSAK No. 105.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Selain terdapat tujuan studi lapang, didalam laporan ini juga terdapat manfaat yang bisa diberikan untuk beberapa pihak yang terkait.

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akuntansi bagi hasil pada pembiayaan produk bank syariah serta untuk menerapkan teori – teori yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah.

2. Bagi perusahaan

Dari hasil penelitian ini, memberikan sumbangan pikiran dan selanjutnya dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

3. Bagi pembaca

Sebagai bahan referensi pembelajaran para pembaca atau penelitian selanjutnya yang ada kaitannya mengenai akuntansi bagi hasil pada pembiayaan produk bank syariah.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Penulis melakukan pembatasan mengenai pembahasan masalah ini, hal ini bertujuan agar pembahasan tidak terlalu luas, maka penulis hanya membahas tentang akuntansi bagi hasil yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Bukopin Surabaya khususnya pada pembiayaan mudharabah.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data yang akurat. Dalam memperoleh data tersebut maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Penulis akan mengumpulkan data-data akuntansi mengenai bagi hasil pembiayaan produk bank syariah dengan melakukan pengamatan langsung pada PT Bank Syariah Bukopin Surabaya.

2. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada responden mengenai data yang diperlukan. Dalam metode ini, data diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan bagian pengurus akuntansi bagi hasil terkait pembiayaan mudharabah PT Bank Syariah Bukopin Surabaya.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mempelajari data keuangan dan dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan akuntansi bagi hasil pada

pembiayaan mudharabah PT Bank Syariah Bukopin Surabaya, sehingga diperoleh manfaat sebagai dasar langkah-langkah dalam menganalisa data.

